

PROSIDING

LOKAKARYA PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN JAWA TIMUR

aan
Timur



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

PROSIDING

Lokakarya Penyusunan Prioritas Program Dan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertanian Jawa Timur

Penyunting:

Ir. Arry Supriyanto, MS.

Ir. M. Cholil Mahfud, MS.

Penyunting Pelaksana:

Drs. Martinus Sugiyarto, MP

Dra. Endang Widajati

Budi Santosa

Suwandoyo

Perpustakaan BPTP Jawa Timur



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

Handwritten signature and date:
6/11/2002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Timur	iii
Rumusan Lokakarya	vii
Daftar Isi	x
Laporan Ketua Panitia Penyelenggara	xii
Arah, Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Jawa Timur di Masa Depan <i>Kabul Santoso, Soetrisno dan Jani Januar</i>	1
Optimasi Pemberdayaan Sumberdaya Alam Pertanian dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Bappeda Jawa Timur</i>	18
Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah <i>Effendi Pasandaran</i>	27
Arah dan Kebijaksanaan Balitbangda Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur <i>Balitbangda Jatim</i>	52
Strategi Perakitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi di Jawa Timur <i>Suyanto H</i>	62
Optimasi Potensi Lestari Sumberdaya dalam Mendukung Pembangunan Perikanan di Jawa Timur <i>Wiadnya, D.G.R; Sutjipto, D.D.; Murachman, Purwodajanto</i>	76
Reorientasi Program dan Kebijaksanaan Pembangunan Perikanan Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Dinas Perikanan Jawa Timur</i>	102
Reorientasi Program dan Kebijaksanaan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Diperta Tingkat I Propinsi Jawa Timur</i>	110

Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Pernakan Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Padang Bambang Wirjono, Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur</i>	123
Pengembangan Sistem Kediri Ekonomi Pedesaan <i>Hidayat Nataatmadja</i>	135
Peran LSM Dalam Mendukung Akslerasi Pembangunan Pertanian di Jawa Tumur <i>Hesti R. Wijaya</i>	139
DAFTAR PESERTA	155

LAPORAN KETUA PANITIA PENYELENGGARA

Yang terhormat, Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur,
Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa Timur
Yang terhormat, Ibu Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur
Bapak, Ibu dan hadirin peserta lokakarya yang kami hormati.

***Assalammualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
selamat beraba hagia bagi yang beragama selain Islam.***

Pertama-tama marilah kita secara bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan nikmat dan ridloNYA semata pada siang hari ini kita diberi kesempatan berkumpul untuk melaksanakan serangkaian acara Lokakarya Penyusunan Prioritas Program dan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertanian Jawa Timur. Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta.

Bapak Gubernur, Bapak Kepala Diperta, Ibu Kepala Kanwil, dan hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini perlu kami laporkan bahwa lokakarya ini diselenggarakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso, Malang selama 2 (dua) hari, pada tanggal 7 sampai dengan 8 bulan Maret tahun 2000, di Hotel Cendana Jalan Kombes. M. Durijat nomor 6 Surabaya. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menyusun prioritas program dan perencanaan strategis pembangunan pertanian menyongsong otonomi daerah Propinsi Jawa Timur, yang akan membahas 11 (sebelas) judul makalah terdiri atas:

1. Arah, Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Jawa Timur di Masa Depan
2. Optimalisasi Pemberdayaan Sumberdaya Alam Pertanian Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur
3. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah
4. Arah dan Kebijakan Balitbangda dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Di Jawa Timur

5. Strategi Perakitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi di Jawa Timur
6. Optimasi Potensi Lestari Sumberdaya Alam Perikanan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Timur
7. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Perikanan Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur
8. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur
9. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur I
10. Pengembangan Sistem Kedirian Ekonomi Pedesaan
11. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Pertanian di Jawa Timur

Bapak, ibu serta hadirin yang kami hormati

Lokakarya kali ini diikuti oleh 66 peserta yang berasal dari :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
2. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi,
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur,
4. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur,
5. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur,
6. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur,
7. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian,
8. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat,
9. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao,
10. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia,
11. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso,
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur,
13. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Timur
14. Lembaga Swadaya Masyarakat,
15. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Propinsi Jawa Timur dan
16. Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA)

Dengan segala kerendahan hati kami segenap panitia pelaksana mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta bapak, ibu dalam lokakarya ini, sekaligus kami mohon maaf apabila selama pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya lokakarya ini.

Kami berharap mudah-mudahan hasil dari lokakarya ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengambil kebijaksanaan dalam rangka menyusun prioritas program dan perencanaan strategi pembangunan pertanian untuk memadukan langkah guna menyongsong otonomi daerah Propinsi Jawa Timur .

Akhirnya kami mohon kepada Bapak Imam Utomo, selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur memberikan pengarahannya sekaligus membuka lokakarya ini secara resmi.

***Sekian terima kasih
Wassalammualaikum warohmatullahi
wabarokatuh.***

Maret, 2000

Panitia Pelaksana

REORIENTASI PROGRAM DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN Mendukung OTONOMI DAERAH DI JAWA TIMUR

**Podang Bambang Wiryono
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur**

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang ditandai dengan adanya hubungan perdagangan bebas, hubungan antar negara tanpa batas, serta intensitas hubungan kerjasama dan sekaligus persaingan, menuntut kemampuan sumberdaya masing-masing negara untuk mempersiapkan/mengantisipasi tingginya kompetisi tersebut khususnya di bidang ekonomi.

Sebagaimana arahan pembangunan pertanian pada era baru menuntut GBHN 1999-2004 yang menjadi landasan reorientasi pembangunan peternakan mengandung makna yaitu keberpihakan kepada rakyat yang sangat sesuai dengan kondisi peternakan di Jawa Timur dimana jumlahnya lebih dari 90% adalah peternakan rakyat dengan skala kecil. Sedangkan Undang-undang no 22 Tahun 1999 dan Undang-undang no 25 Tahun 1999 intinya memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur bidang pemerintahan dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Namun hendaknya tetap disadari bahwa pemerintah pusat walaupun lebih kecil kewenangannya tetapi tetap lebih kuat. Begitu pula visi pembangunan peternakan di era reformasi adalah "Terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal".

Dengan demikian maka program dan kebijaksanaan pembangunan peternakan harus disesuaikan dengan paradigma-paradigma baru seperti tersebut di atas. Kejadian krisis moneter yang akhirnya menjadi krisis ekonomi secara langsung berdampak pada perkembangan hasil-hasil pembangunan peternakan, yang paling parah terpukul adalah industri ayam ras.

Kondisi seperti ini apabila tidak segera ditanggapi, maka cepat atau lambat akan terjadi pengurangan populasi ternak lainnya sebagai konsekuensi tuntutan pemenuhan kebutuhan akan daging/telur/susu yang sebelumnya hampir

tercukupi. Pembangunan peternakan untuk masa yang akan datang seharusnya tidak bertumpu pada bahan-bahan impor sehingga mengabaikan sumberdaya lokal yang kalau dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh akan memberikan keuntungan bagi peternakan rakyat dengan penekanan biaya produksinya.

Hasil peternakan di Jawa Timur yang sebagian besar adalah merupakan hasil keringat para peternak rakyat skala kecil yang berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan didukung dengan sumberdaya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum memadai akan merupakan tantangan dalam merebut peluang yang ada.

Untuk itu kita harus berani mengadakan pembaharuan dengan memperbaiki segala aspek teknis maupun non teknis dari sumberdaya lokal yang tersedia.

POLA PIKIR REORIENTASI PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Dalam konsep Propernas pertanian Kabinet Persatuan Nasional 2000-2004, disebutkan bahwa penyempurnaan program pembangunan pertanian merupakan bagian dari proses reformasi yang menuntut adanya peningkatan efisiensi, transparansi demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik di bidang perencanaan pembangunan, penyuluhan, pelayanan teknis, teknologi hingga pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kecil. Prinsip utama pendekatan ini adalah semua pihak yang berperan, baik yang melayani maupun yang dilayani secara bersama-sama (a) Menganalisis masalah atau kebutuhan pembangunan wilayah berdasarkan informasi obyektif, (b) Menggali potensi dan alternatif mengatasi masalah dan merespon kebutuhan masyarakat, dan (c) Mengambil keputusan secara nasional berdasarkan metode serta kriteria yang disepakati bersama. Untuk itu berbagai metode pendekatan partisipatif yang telah tersedia akan terus disosialisasikan dan difasilitasi penerapannya.

Untuk terwujudnya Good Governance diperlukan adanya kepastian hukum sesuai dengan perundangan yang berlaku. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, kemana dan bagaimana sistem alokasi

dana serta siap yang memperoleh dana tersebut. Perlu sosialisasi program secara benar sehingga dapat dimengerti dengan jelas oleh semua pihak (termasuk masyarakat luas). Perlu dikembangkan standar, parameter keberhasilan dari kegiatan yang bersifat akuntabel yang terukur secara jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan. Di samping itu profesionalisme perlu dikembangkan dengan konsepsi kinerja yang lebih optimal sehingga terjadi proses modernisasi melalui pergeseran sikap untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan jaman.

Peran pemerintah dalam mewujudkan paradigma baru melalui reformasi pembangunan peternakan dituntut untuk lebih memberikan pelayanan prima kepada masyarakat peternakan, sehingga diharapkan pembangunan peternakan ke depan akan menghasilkan:

- Kepercayaan terhadap pembangunan peternakan oleh masyarakat
- Investasi bidang peternakan akan meningkat dan bersaing
- Ekonomi dengan biaya tinggi dalam usaha peternakan dapat ditekan sekecil mungkin dan bahkan dapat menurun

Dengan demikian otomatis pendapatan pemerintah akan lebih meningkat

POTENSI SUMBERDAYA

A. Populasi Ternak

Perkembangan populasi ternak di Jawa Timur dalam perhitungan sampai dengan akhir tahun 1999 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Pencapaian populasi ternak sampai dengan akhir tahun 1999 belum seluruhnya dapat dicapai dari sasaran yang telah ditetapkan kecuali jenis ternak ayam ras petelur (105,04%).

Adapun pencapaian angka populasi ternak terhadap angka sasaran pada akhir tahun 1999 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ternak	Sasaran	Realisasi	%
1.	Sapi potong	3.408.823	3.380.547	99,17
2.	Sapi perah	130.849	129.775	99,17
3.	Kerbau	151.625	144.208	95,10
4.	Kuda	30.554	29.026	94,99
5.	Kambing	2.288.891	2.264.992	98,95
6.	Domba	1.342.163	1.333.518	99,35
7.	Babi	28.991	27.426	94,60
8.	Ayam buras	37.867.944	36.920.771	97,49
9.	Ayam petelur	6.489.328	6.816.930	105,04
10.	Ayam broiler	14.333.953	7.150.680	49,88
11.	Itik	2.286.303	2.281.549	99,79

B. Produksi dan Konsumsi Hasil Ternak

Produksi dan konsumsi hasil ternak berupa daging, telur dan susu di Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 1999 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Sasaran	Realisasi	%
1.	<u>Produksi (ton)</u>			
	- Daging	208.346	200.633	96,29
	- Telur	75.383	70.358	93,33
	- Susu	100.300	99.477	99,17
2.	<u>Konsumsi (kg/kap/th)</u>			
	- Daging	5,953	5,732	96,28
	- Telur	1,938	1,809	93,34
	- Susu	2,149	2,132	99,21

C. Sumberdaya Manusia

Keadaan pegawai Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang tercatat pada tahun 1998/1999 dari masing-masing tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SD	62
2.	SLTP	50
3.	SLTA	191
4.	SMD	9
5.	S1	225
6.	S2	2
7.	S3	1
	Jumlah	540

Potensi sumberdaya manusia menurut angka perkiraan dari lulusan per tahun beberapa perguruan tinggi negeri/swasta dan sekolah peternakan negeri/swasta di Jawa Timur masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Asal	Perkiraan Lulus/Thn
1.	Fakultas (8 buah)	320 orang
2.	SNAKMA (7 buah)	280 orang
	Jumlah	600 orang

Khusus untuk menangani tenaga inseminasi buatan (IB) di Jawa Timur pada tahun 1998/1999 adalah sebagai berikut:

No.	Tenaga Aktif	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1.	Inseminator			
	- Dinas	276	276	-
	- Swadaya	399	1.000	601
	- KUD/KOP	62	100	38
2.	PKB	319	350	31
3.	ATR	154	154	-
	Jumlah	1.210	1.880	670

Pengadaan semen beku untuk menunjang kegiatan IB dicukupi dari Balai Inseminasi Buatan yang ada di Lembang (Bandung) dan Singosari (Malang). Adapun jumlah ternak sebagai tenaga kerja yang juga mengelola usaha peternakan rakyat yang masih aktif mengelola usahanya berdasar atas parameter adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ternak	Jumlah (orang)	Kelompok Tani
1.	Sapi potong	1.059.124	2.137
2.	Sapi perah	41.869	521
3.	Kerbau	48.344	23
4.	Kuda	10.330	0
5.	Kambing	135.085	1362
6.	Domba	67.484	1103
7.	Babi	3.565	0
8.	Ayam buras	291.570	13078
9.	Ayam petelur	25.550	212
10.	Ayam broiler	4.584	122
11.	Itik	22.272	223
	Jumlah	1.709.777	18.781

Jumlah pabrik pakan yang beroperasi saat ini 12 buah, dengan kapasitas produksi 199.083 ton/bln, saat ini masih memproduksi rata-rata 41.253 ton/bln, sehingga masih ada kekurangan sejumlah 157.830 t/bln (79,28%).

PROSPEK PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Dalam rangka pembangunan peternakan di Jawa Timur, secara konsepsional mencakup semua aktivitas mulai dari pengadaan sarana produksi peternakan, budidaya, pasca panen sampai dengan pemasaran hasil serta pengolahannya. Berdasarkan arahan Menteri Pertanian Kabinet Persatuan Nasional program pembangunan pertanian secara nasional difokuskan kepada Program Ketahanan pangan dan Program Agribisnis, sebagai konsekuensinya proyek-proyek-proyek yang dilaksanakan harus menghasilkan bahan pangan yang bermutu, tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kondisi tersebut akan dapat dicapai dengan tersedianya sumberdaya manusia yang berpengalaman, sarana dan prasarana, penerapan teknologi peternakan yang menjadi dasar bagi pengembangan produksi dan kualitas produksi yang lebih mantap di Jawa Timur.

Prospek pengembangan usaha peternakan di Jawa Timur selain hal-hal tersebut di atas sebenarnya juga tidak terlepas dari konsisi dan situasi yang berkembang saat ini yaitu stabilitas politik, sosial, ekonomi yang telah mengarah ke perbaikan sehingga memberi indikator kepada pengusaha untuk berani mengembangkan usahanya di sini.

Kondisi unggulan yang mempunyai prospek cukup baik untuk pasar di dalam dan di luar negeri antara lain ayam petelur, ayam pedaging, sapi, kambing dan domba.

Pembangunan peternakan diarahkan untuk menghasilkan berbagai produk unggulan yang mampu memantapkan ketahanan pangan, persaingan di pasar domestik maupun internasional dilaksanakan dengan mengembangkan secara optimal potensi wilayah masing-masing disesuaikan dengan komoditas yang tersedia serta menggalakkan peran aktif masyarakat peternak.

Menurut perhitungan maka prospek usaha peternakan masih cukup baik dengan melihat beberapa peluang di dalam negeri yaitu adanya kekurangan pemenuhan daging, telur dan susu sebagai berikut:

No.	Uraian	Sasaran	Realisasi	Kekurangan	%
1.	Daging	208.346	200.633	7.713	3,70
2.	Telur	75.383	70.358	5.025	6,66
3.	Susu	100.300	99.477	823	0,82

KEBIJAKSANAAN

Sejalan dengan arah pembangunan peternakan maka dilakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan peternakan antara lain meliputi :

a. Pengembangan Produksi Daging

- Konsolidasi dan peningkatan usaha peternakan rakyat ke arah komersil, berorientasi pasar melalui pendekatan teknis, terpadu ataupun agrobisni.
- Pengendalian pemotongan ternak betina produktif.
- Kegiatan intensifikasi berupa Gerbang Intan Desa (Gerakan Pembangunan Inseminasi Buatan di Desa) yang dipertajam dengan INTAN SEJATI (Inseminasi Buatan Sejuta Akseptor Sapi), Inseminasi Buatan ternak lainnya, Gerbang Serba Bisa (Gerakan Pembangunan Sentra Baru Pembibitan di Pedesaan), SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan) serta sapi kereman yang diharap dapat memacu produksi dan produktivitasnya.
- Pengembangan pola kemitraan.

b. Pengembangan Produksi Telur

- Pengembangan produksi telur dilakukan dengan pilihan komoditas unggas (ayam ras, ayam buras dan itik) untuk memenuhi permintaan karena relatif cepat dan murah.
- Guna menyelamatkan usaha peternakan ayam ras petelur maka telah diupayakan penyehatan kembali likuiditas kredit untuk petani kecil,

disamping juga upaya penekanan biaya produksi khususnya pakan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

- Sedangkan pengembangan dan pembinaan pada ayam buras dan itik diupayakan melalui kegiatan intensifikasi antara lain INTAB (Intensifikasi Ternak Ayam Buras), Gema Laras Bangsa (Gerakan Masyarakat Menggalakkan Ayam Buras untuk Membangun Desa), Gemarapai (Gerakan Makan Telur Ayam bagi Putra-Putri Indonesia), baik Gema Laras Bangsa maupun Gemarapai keduanya merupakan tindak lanjut GKD (Gerakan Kembali ke Desa) pada sub-sektor peternakan.

c. Pengembangan Produksi Susu

- Pengembangan produksi susu khususnya pada sapi perah dilakukan dengan melalui konsolidasi agrobisnis dan agroindustri persusuan dengan mengefisiensikan seluruh mata rantai sub-sistem agribisnis sapi perah sejak pada tahap produksi di tingkat peternak, penanganan pasca panen, pemasaran pada tingkat ternak, koperasi dan Industri Pengolahan Susu (IPS).
- Intensifikasi sapi perah melalui program UPSUS (Upaya Khusus), IB (Inseminasi Buatan), perbaikan manajemen pakan ternak, kesehatan serta sanitasi dan hygiene.
- Penyaluran kredit sapi perah impor dalam rangka meningkatkan mutu genetik, jumlah populasi dan produksi susu.

d. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia sangat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan peternakan baik yang menangani langsung usaha peternakan maupun yang tidak langsung menangani usaha tersebut. Perkembangan kemampuan sumberdaya manusia harus bisa mengimbangi laju perkembangan IPTEK dan persaingan pasar global baik domestik maupun internasional.

e. Pengembangan Kelembagaan

Peranan kelembagaan pada jajaran pembangunan peternakan yang diawali dari kelompok peternak hingga kelembagaan pemerintah dan swasta masih perlu untuk lebih ditingkatkan keberadaannya.

Diharapkan keberadaan lembaga-lembaga tersebut dapat lebih dinamis dalam rangka menjadi motivator peternak yang lebih baik dan maju, serta menjadi pembina dalam merubah pola pikir peternak dari usaha tradisional ke arah agribisnis.

f. Pengembangan Wilayah

Dalam usaha memajukan pembangunan peternakan di daerah hendaknya diperhatikan untuk memprioritaskan komoditi ternak unggulan daerah, peranan sumberdaya alam (air, pakan, lingkungan), sumberdaya manusia, adat istiadat serta peluang pasar yang cukup. Komoditi unggulan wilayah dapat dikembangkan melalui bentuk kawasan atau penerapan agribisnis dengan mempertimbangkan skala kecil dan menengah serta memberikan jaminan keuntungan kepada peternak.

g. Peranan Swasta

Peranan sektor swasta termasuk koperasi perlu untuk lebih dimantapkan sehingga pada akhirnya peranan pemerintah hanya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan pihak swasta bersama masyarakat.

PELUANG DAN TANTANGAN

Kondisi peternakan yang saat ini sedang menuju ke arah perbaikan akibat krisis ekonomi, mengandung arti pula bahwa ada peluang guna meningkatkan populasi dan produksi untuk substitusi impor dengan memperbaiki manajemen sehingga akan diperoleh hasil yang efektif dan efisien.

Sebelum krisis terjadi di negara kita produksi daging ayam potong sudah bisa mencukupi kebutuhan daging sekitar 70% dari kebutuhan konsumsi daging

secara keseluruhan, sedangkan kondisi saat ini walaupun belum pulih tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah itu.

Belum lagi kondisi sapi potong dimana banyak importir yang tidak lagi melakukan aktivitasnya karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar.

Untuk itu kita harus cepat dalam mengambil langkah konkrit agar kondisi tersebut dapat berakhir dengan berorientasi pada hasil-hasil di dalam negeri.

Potensi ternah yang ada yang sebenarnya cukup baik produktivitasnya jika diberikan sentuhan-sentuhan teknologi sederhana. Di sini harus diperbaiki tata laksana kandang, pakan, pencegahan penyakit dan tentu saja sapta usaha secara utuh sebaiknya dilaksanakan.

Usaha ayam ras kita lakukan dengan persiapan-persiapan yang lebih matang lagi terutama pada hilirnya yaitu penyediaan bahan baku pakan dan obat-obatan dari dalam negeri.

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Dengan latar belakang terpuruknya usaha peternakan dalam kondisi krisis ekonomi maka permasalahan yang timbul harus kita pecahkan menuju ke arah pemulihan, pemantapan dan selanjutnya pengembangan. Untuk itu maka beberapa upaya yang harus dilakukan antara lain adalah:

a. Pengadaan sapronak

Pengadaan sarana produksi peternakan utamanya pakan harus diupayakan dengan menggunakan bahan baku lokal semaksimal mungkin untuk mengganti bahan baku impor, misalnya: bungkil kelapa, kedelai, tepung ikan, tepung ketela, katul, jagung dll.

Peternak diusahakan bisa membuat formula dengan bantuan para pakar melalui bahan baku yang tersedia cukup di wilayahnya. Perlu adanya pabrik-

pabrik pakan mini di sentra-sentra produksi bahan pakan lokal yang cukup tersedia.

b. Budidaya

Adanya perlindungan terhadap para peternak kecil yang mempunyai aset cukup besar dalam pembangunan peternakan di Jawa Timur. Pengusaha pembibitan dan pakan ternak boleh mengembangkan budidaya dengan sistem kemitraan bersama peternak sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Pengawasan pemerintah harus dilakukan agar kemitraan benar-benar mengikutsertakan para peternak dan bukannya dari-anak perusahaannya sendiri.

c. Kelembagaan

Sebagaimana diketahui bahwa peternakan rakyat secara mandiri dengan skala kecil sangat sulit untuk berkembang, bahkan untuk bertahan pun relatif sulit. Untuk itu sebaiknya para peternak kecil bergabung dalam wadah kelompok/koperasi, sehingga mempunyai posisi "bargaining" yang cukup kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kian hari kian kompleks.

d. Pemasaran

Untuk menjamin harga jual yang layak dan menguntungkan maka melalui asosiasi/perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sebaiknya membuat *Market Board System*. MBS inilah yang bertindak sebagai badan pengendali pasar. Dengan memperhitungkan biaya produksi dan keuntungan yang wajar maka konsumen pun akan membayar dengan harga yang wajar pula. Apabila keseimbangan ini diterima oleh kedua belah pihak maka usaha peternakan akan berjalan dengan wajar.

KESIMPULAN

- a. Dengan berbagai upaya untuk menyelamatkan sumberdaya peternakan yang telah dilaksanakan dalam menghadapi krisis ekonomi maka tingkat perkembangan usaha peternakan saat ini telah mengarah ke pemulihan, dengan indikator meningkatnya populasi ternak.
- b. Reorientasi perkembangan peternakan merupakan jawaban terhadap tantangan-tantangan pada usaha peternakan khususnya dalam menyambut era globalisasi yang tidak hanya berkisar pada sumberdaya alam saja, akan tetapi juga meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya.
- c. Peluang usaha peternakan masih cukup terbuka selain untuk substitusi impor juga untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam hal ketahanan pangan khususnya kecukupan protein hewani asal ternak.

PENUTUP

Reorientasi program ini disusun agar bisa dimengerti dan diterima oleh semua pihak yang terkait, sehingga bisa mewujudkan kerjasama yang harmonis untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Semoga.

DAFTAR HADIR

No	Nama	Instansi
1.	A. Latief Abadi	FP. Unibraw
2.	Achmadi	KTNA Lamongan
3.	Agus Sugiyatno	IPPTP Tlekung
4.	Agus Suryadi	BPTP Karangploso
5.	Anang Triwiratno	IPPTP Tlekung
6.	Arry Supriyanto	IPPTP Tlekung
7.	Balitbangda Jatim	Balitbangda Tk. Prop. Jatim
8.	Bambang Pamudji	IPPTP Wonocolo
9.	Bambang Siswanto	IPPTP Wonocolo
10.	Bangun Nusantara	BPTP Karangploso
11.	Bappeda	Bappeda Tk. I Prop. Jatim
12.	Baswarsiati	BPTP Karangploso
13.	Budi Santosa	BPTP Karangploso
14.	Damat	FP Unmuh Malang
15.	Didik Budi Wijono	IPPTP Grati
16.	Didik Sulistyanto	Lemlit Univ. Jember
17.	Dini Hardini	BPTP Karangploso
18.	Diperta Pangan Daerah	Diperta Pangan Daerah Tk. I Jatim
19.	Djoma'ijah	IPPTP Tlekung
20.	Dwi Setyorini	BPTP Karangploso
21.	Eddy Purnomo	IPPT Wonocolo
22.	Effendi Pasandaran	P4 Badan Litbang Pertanian
23.	Endah Retnaningtyas	BPTP Karangploso
24.	F. Kasijadi	BPTP Karangploso
25.	Forita Dyah Arianti	BPTP Ungaran
26.	Gatot Subiyanto	BIPP Lamongan
27.	Gunawan Sukarso	P3GI Pasuruan
28.	Hendarto	Kanwil BRI
29.	Hendri Arianto	IPPTP Tlekung
30.	Heru Sudarsono	BPTP Karangploso
31.	Hesti R. Wijaya	Yayasan Pengembangan Pedesaan (LSM)
32.	Hidayat Nataatmadja	PSE Bogor

33.	HM. Kadir Rasyidi	KTNA Tk. I Jatim
34.	I Made Rai Yasa	IPPTP Denpasar
35.	I.G.A.K. Sudarmaja	IPPTP Denpasar
36.	Iffah Irsjadina	BPTP Karangploso
37.	Kabul Santoso	Universitas Jember
38.	Karimah	BAPPEDA Tk. I Jatim
39.	Kusdiarianto	Diperta Tk. I Jatim
40.	Luki Rosmahani	BPTP Karangploso
41.	Lukman Affandy	IPPTP Grati
42.	M. Ali Yusran	IPPTP Wonocolo
43.	M. Cholil Mahfud	BPTP Karangploso
44.	M. Soleh	BPTP Karangploso
45.	Mochtar Effendy	BIPP Jombang
46.	Muchari	BPTP Lembang
47.	Mutia Erti Devi	IPPTP Tlekung
48.	Nunuk Sunu SW	BLPP Ketindan
49.	Nurul Istiqomah	BPTP Karangploso
50.	Padang Bambang W	Dinas Peternakan Daerah Tk. I Jatim
51.	Pudji Santosa	BPTP Karangploso
52.	Pudjiyanto	Puslit Kopi & Kakao
53.	Pudyantono	Diperta Lamongan
54.	Rina EW	BPTP Karangploso
55.	Roesmiyanto	BPTP Karangploso
56.	Ruly Hardianto	BPTP Karangploso
57.	Sarjana	BPTP Ungaran
58.	Sarwiyono	Faperta Unibraw
59.	Sentot R. Soemarsono	BPTP Karangploso
60.	Siti Hartanti	FP. Univ. Jember
61.	Sjaiful Chanafi	BPTP Karangploso
62.	Soehartono	Diskan Tk. I Jatim
63.	Sri Hartiningsih	BLPP Batu
64.	Sri Prapti	Kanwil Pertanian
65.	Sri Yuniastuti	BPTP Karangploso
66.	Suhardjo	BPTP Karangploso
67.	Suhartono	Dinas Perikanan Daerah Tk. I Jatim
68.	Sukarno Roesmarkam	BPTP Karangploso

- | | | |
|-----|---------------|------------------|
| 69. | Supangat | BPTP Karangploso |
| 70. | Suprptono | Diperta Jombang |
| 71. | Sutanto JT | IPPTP Wonocolo |
| 72. | Suwandi | IPPTP Wonocolo |
| 73. | Suwarso | Balittas Malang |
| 74. | Suwono | BPTP Karangploso |
| 75. | Suyamto H | BPTP Karangploso |
| 76. | Uum Umiyasih | IPPTP Grati |
| 77. | Wiadnya DGR | Faperta Unibraw |
| 78. | Wigati Istuti | IPPTP Wonocolo |
| 79. | Yoga Ekawati | IPPTP Wonocolo |
| 80. | Yudha Sukardi | IPPTP Wonocolo |